



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
JL. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : W.IIAK. 008 / 392/ 1991

Perihal : Penyerahan Piagam kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Mengingat :

1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah terwujudnya kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

1. Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Ja. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat No. W.IIAK. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada batas di atas, yang merupakan suatu kesatuannya dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah *Tatidaiyah*, Piagam tersebut dapat diehab dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibutuhkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 10 - Mei - 1991

*DIREKTORAT JENDERAL KANTOR WILAYAH
KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH
DRA. H. DIAUHARUDIN AR.*
NIP. 150.112.7841.001

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binlinga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/City, prov. B. Bogor
4. Ketua Komite Kerja Madrasah, PERCERAI, Lape, B. 9.5.9.7

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/IHK. 008/.....392/1991..... tanggal

..... 1 Mei..... 1991, dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah,

kepada :

- | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. N a m a | : | <u>NASATUL ISLAMIYAH</u> |
| 2. No. Register | : | <u>01/05/1991</u> |
| 3. Alamat : | Jalan/Kamp. | <u>Latardon</u> |
| | Kel./Desa | <u>Pagelaran</u> |
| | Kecamatan | <u>Ciomas</u> |
| | Kab./Kodya | <u>Bogor</u> |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | <u>Milun 1947</u> |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | <u>KH. Abd. Fatah</u> |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 1 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala-Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat.

